



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,
Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.247/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2915/D2/09/2020 Tanggal 2 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang IV, pada Hari Jum'at Tanggal 8 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST
NIP : 198701152007011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Yan Hadynoer, S.S.T.TP
NIP : 19900912 200912 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Nusa Tenggara
Barat T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Widajati Tjatur Surjadi, S.H., M.M
NIP : 19680812 199403 2 020
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
4. Nama : L. Arief Gunawan, S.E., M.Si
NIP : 19761021 201001 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. SOP Pengakhiran Masa Kerja dan Mutasi Pegawai Pengelola Informasi Berklasifikasi.
- d. SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi (NTB C-SIRT).
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (DPA – Bidang Sandikami) Tahun 2020.
- f. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Persandian Pemprov Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
- g. Daftar Sarana Kerja;
- h. Daftar Sumber Daya Manusia Bidang Sandi dan Keamanan Informasi.
- i. Foto Sosialisasi Keamanan Informasi tahun 2019.
- j. Foto kegiatan Tim ITSA BSSN.
- k. Foto Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2019.
- l. Foto ruangan penyimpanan palsan dan APU.
- m. Foto pengarsipan dokumen.
- n. Daftar Peralatan Sandi;
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *Video Conference*, *email* dan *chat* pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **HASIL SEMENTARA** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada **Level III** dengan kategori tingkat kepatuhan **CUKUP** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:

RAHASIA

- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 63,75
- b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 66,67
- c. Operasional Persandian.
Nilai: 50,77

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN			
Tingkat Kepatuhan			
Tata Kelola & Kerangka Kerja		63,75	
Pengelolaan SD Persandian		66,67	
Operasional Persandian		50,77	
Total Skor		60,40	dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Cukup		
Definisi Tingkat Kepatuhan			
Sangat Tinggi	91-100	level 5	
Tinggi	76-90	level 4	
Cukup	61-75	level 3	
Kurang	51-60	level 2	
Sangat Kurang	0-50	level 1	

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		63,75
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	80,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	36,67
Pengelolaan SD Persandian		66,67
SDM Sandi	:	76,00
Materiil Sandi dan JKS	:	60,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	71,43
Tempat Kegiatan Sandi	:	52,00
Operasional Persandian		50,77
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	46,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:


1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mohamad Nur Afif, S.ST.
NIP. 198701152007011001

Mewakili PIHAK KEDUA

Widajati Tjatur Surjadi, S.H., M.M.
NIP. 19680812199403 2 020



Mengetahui,
a.n Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Dokumentasi Video Conference 7 Oktober 2020

INSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Kategori Pengawasan	Status Pemastian
1	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
2	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
3	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
4	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
5	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
6	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
7	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
8	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
9	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan
10	Apakah terdapat Pemastian yang memiliki Undi Teknik Persandian (UTP) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi Pemerintah?	Ya, sudah terdapat dan sudah terjamin sesuai peraturan

in jumlah perangkat daerah
hubung dengan jalur aman
ini diharapkan
akan pelaksanaan
yang terdiri dari 2 sub
pat menjadi inputan ba
ukan pembinaan
dit persandian ini, bisa
mengukur IKK Pemda

RAHASIA

2. Dokumentasi Pengiriman Data Dukung melalui e-mail sanapati.net

DATA DUKUNGAN AUDIT PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI



pemprov_ntb

Yesterday, 8:28

Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Reply all



BUKU KUNCI SANDI AN...
625 KB



BUKU KUNCI SANDI BL...
761 KB



BUKU KUN...
1 MB

Show all 6 attachments (10 MB) Download all

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, mohon izin untuk mengirimkan data pendukung tahap awal pasca Audit Persandian dan Keamanan Informasi sejumlah 6 File Pendukung. Mohon untuk di konfirmasi. terimakasih atas kerjasamanya

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PROVINSI NTB



pemprov_ntb

Mon 10/5, 8:06

Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Reply all



indikator22d (SOP PENE...
809 KB



indikator22e (SOP PENA...
805 KB



indikator22...
604 KB

Show all 5 attachments (4 MB) Download all

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, berikut kami lampirkan data pendukung tambahan untuk Area bidang Pengelolaan Sumberdaya Persandian point 5, mohon untuk di konfirmasi
nikko, terimakasih

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PROVINSI NTB



pemprov_ntb

Fri 10/2, 13:53

Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Reply all



BAGAN STRUKTUR ORG...
420 KB



PERUBAHAN ATAS PERA...
4 MB



PERUBAHA...
4 MB

Show all 28 attachments (50 MB) Download all

kami kirimkan data pendukung untuk keperluan audit penyelenggaraan persandian keamanan dan informasi prov NTB
niko, terimakasih